



Ilustrasi: Ingrid Damara Wijaya

# Kehidupan Masyarakat Pesisir di Indonesia

*Wida Dhelweis Yistiarani*

Tercatat hingga tahun 2017, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia dengan panjang 99.093 km persegi.<sup>1</sup> Wilayah di sekitar garis pantai tersebut disebut sebagai pesisir yang dapat diartikan pula sebagai wilayah peralihan antara darat dan laut yang saling berinteraksi. Interaksi ini dimungkinkan karena kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir bergantung pada darat dan laut.

Masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dapat disebut sebagai masyarakat pesisir. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beragam profesi, mulai dari nelayan, petani, pedagang, pembudidaya ikan hingga petambak. Dari berbagai profesi yang ada, nelayan menjadi profesi yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat pesisir dan paling banyak memanfaatkan hasil laut untuk kelangsungan hidupnya. Nelayan menjadikan laut sebagai tempat mencari hasil tangkap, sedangkan daratan sebagai tempat menjual hasil tangkapannya. Selain hasil tangkap, laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir juga memiliki ragam sumber daya, seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan sumber energi terbarukan.

Banyaknya populasi masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari lima puluh persen mendiami pesisir merupakan warisan dari masa kolonial yang memusatkan aktivitas ekonomi dan politik di kawasan

---

1. "Refleksi 2017 Dan Outlook 2018 Membangun Dan Menjaga Ekosistem Laut Indonesia Bersama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 9 Januari, 2017, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-outlook-2018-membangun-dan-menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>

pesisir.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat pada tempat-tempat yang sampai saat ini masih menjadi pusat aktivitas ekonomi dan politik di kawasan pesisir, di antaranya adalah Medan, Lampung, Jakarta (dahulunya Sunda Kelapa), Semarang, Surabaya dan Makassar. Meskipun masa kolonial berperan memusatkan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir, hal serupa pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya yang telah mengembangkan teknik pembuatan kapal dan menjadi kerajaan maritim tertua di Nusantara. Perkembangan peradaban pesisir mulai mengalami peningkatan yang signifikan melalui kontak aktif dengan para pedagang dari India, Persia, Arab, dan Cina.<sup>3</sup>

Meskipun memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, tidak serta merta menjadikan masyarakat Indonesia bercorak kebudayaan pesisir sejak awal. Lombard menyatakan bahwa kebudayaan pesisir merupakan kebudayaan yang merefleksikan; pertama, elemen Islam. Kedua, menggunakan bahasa Melayu yang menjadi *lingua franca* dalam aktivitas dagang di Nusantara. Ketiga, menampilkan keberadaan budaya Cina karena adanya keberadaan mereka dari wilayah utara yang kemudian membentuk koloni di pesisir Nusantara.<sup>4</sup> Terbentuknya kebudayaan pesisir berdasarkan definisi Lombard ini dilatarbelakangi oleh proses panjang interaksi masyarakat asli dengan para pedagang Cina, India, Persia dan Arab. Selain itu, pendirian kesultanan Demak

pada abad ke-16 juga ikut memengaruhi terbentuknya identitas masyarakat pesisir tersebut. Aktivitas dagang yang begitu mendominasi terbentuknya kebudayaan pesisir ini pada dasarnya hanya memanfaatkan laut sebagai pintu keluar dan masuk barang dagangan yang notabenehnya didapatkan dari pedalaman (daerah agraris).

Narasi yang dibentuk oleh Lombard mengenai kebudayaan pesisir mengesampingkan keberadaan nelayan yang telah menggantungkan hidupnya pada ekosistem pesisir. Padahal, nelayan dan aktivitas melautnya ikut membentuk identitas kebudayaan daerah pesisir, tempat di mana mereka tinggal.<sup>5</sup> Nelayan dapat tidak diikutsertakan dalam narasi kebudayaan pesisir karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk hadir di tengah arena politik, sehingga sangat rentan dieksploitasi oleh para pemilik tanah, pemilik kapal dan pemerintah.<sup>6</sup>

Luas laut Indonesia mencapai 2,7 juta km<sup>2</sup> dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2,1 juta km<sup>2</sup>. Di samping potensi mineral dan tambang di laut yang melimpah seperti gas dan minyak bumi, lumbung ikan menjadi salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sumber daya ikan yang ada di laut Indonesia menjadi penghidupan utama masyarakat pesisir, terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 1983, tercatat jumlah nelayan tradisional di Indonesia mencapai 1,3 juta jiwa dengan jumlah hasil tangkapan

2. Gerrit J. Knapp, *Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1775*, (Leiden: KITLV Press, 1996).

3. Endang Susilowati, Singih Tri Sulistiyono, dan Yety Kurnianingsih, "Coastal Civilization and maritime diplomacy in premodern Southeast Asia". *The International Journal of Maritime History*, Vol. 30, No. 4, 2018, hlm. 649—662.

4. Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

5. Julie Urquhart dan Tim Acott, "A Sense of Place in Cultural Ecosystem Service: The Case of Cornish Fishing Communities." *Society and Natural Resources*, Vol. 27, No. 1, 2013, hlm. 3—19.

6. James M. Acheson, "Anthropology of Fishing." *Annual Review Anthropology*, Vol. 10, No. 1, 1981, hlm. 225—316.

1,9 juta ton/tahun dari total tangkapan nasional 6.5 juta ton/tahun. Namun, sebagian besar hasil tangkapan nasional diperoleh dari perusahaan-perusahaan ikan dengan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir. Tercatat persentase sumbangsih perusahaan ikan terhadap hasil tangkapan nasional mencapai 71%.

Laut merupakan tempat yang berbahaya dan asing bagi manusia<sup>7</sup> Nelayan dapat melaut dengan bantuan peralatan buatan seperti perahu dan jaring, namun kondisi alam seperti tinggi gelombang, angin, dan cuaca turut menjadi penentu jumlah hasil tangkapan mereka. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam, terdapat empat jenis nelayan yaitu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik. Akses lebih terhadap teknologi yang dimiliki perusahaan ikan dan nelayan pemilik kapal memungkinkan mereka untuk lebih cepat beradaptasi dan mengantisipasi cuaca serta aktivitas laut. Sementara itu, nelayan tradisional tetap sepenuhnya bergantung pada cuaca dan kondisi perairan di laut.

Kerentanan terhadap nelayan disebabkan oleh karakteristik mereka yang masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat berburu dan meramu yang sepenuhnya hanya bergantung pada kondisi alam.<sup>8</sup> Dengan karakter tersebut, nelayan tidak bergantung pada kelompok masyarakat lainnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terlebih

lagi, laut bagi mereka merupakan *common property*,<sup>9</sup> sehingga tidak ada upaya dari mereka untuk memprivatisasi laut sebagaimana yang lazim terjadi di daratan.

Kerja nelayan pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi primitif, yakni kegiatan kerja ekonomi berburu dan meramu.<sup>10</sup> Apabila aktivitas penangkapan ikan dianggap berbeda dengan berburu dan meramu, maka hal itu berpangkal pada objek kerja (ikan) yang kemudian menjaral pada teknologi kerja. Penangkapan ikan dan berburu dan meramu sejatinya adalah kegiatan yang sama, yaitu kegiatan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas menangkap ikan yang menempatkan nelayan sebagai pemetik sumber daya dari alam tanpa turut terlibat campur tangan dalam pertumbuhan dan reproduksi sumber daya tersebut.<sup>11</sup>

Kondisi pekerjaan nelayan yang masih berburu dan meramu ini menjadikan posisi mereka penuh dengan ketidakpastian. Berbeda dengan petani, nelayan tak dapat memanipulasi laut, mengendalikan cuaca agar mendapatkan hasil tangkap yang optimal, maupun mengatur jumlah dan mutu hasil kerja. Nelayan hanya mampu meningkatkan upaya penangkapan (*fishing efforts*), dengan harapan mampu mendapatkan hasil tangkapan dengan optimal.

Berbeda dengan kondisi nelayan yang tak mampu memanipulasi kondisi alam dan perolehan hasil tangkap,

7. James M. Acheson, "Anthropology of Fishing".

8. James M. Acheson, "Anthropology of Fishing."

9. Pujo Semedi, *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*, (Jakarta: KONPHALINDO, 1998), hlm. 13.

10. Gisli Palsson, "The Art of Fishing," *Maritime Anthropological Studies*. Vol. 2, No. 1, 1989, hlm. 1—20.

11. Tesart dkk., "Some Major Problems in the Social Anthropology of Hunter-Gatherers [and Comments and Reply]."

*Current Anthropology*. Vol. 29, No.1, 2018, hlm. 1—31.

petani masih mampu memiliki kendali untuk mengintervensi produksi. Petani dapat memperkirakan besaran hasil panen karena dapat mengolah tanah sebagai objek kerja mereka. Kondisi tersebut menjadikan nelayan sebagai *the poorest of the poor* di antara masyarakat Indonesia di tengah tuntutan berbagai kebutuhan hidup yang semakin berat.<sup>12</sup>

Kekayaan sumberdaya di kawasan pesisir Indonesia adalah fakta yang pejal. Namun, mengapa nelayan, sebagai representasi dari kawasan pesisir, masih tetap miskin? Mengapa nelayan masih tetap bertahan meski terus diterpa ketidakpastian? Problem-problem yang dialami nelayan dan masyarakat pesisir, tentu saja, tak hanya berasal inheren dari diri mereka sendiri. Ada faktor-faktor lain yang turut memengaruhi struktur sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang terdapat dalam kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir secara umum.

Dalam jurnal ini terdapat lima tulisan yang membahas tentang masyarakat pesisir. Artikel pertama ditulis oleh Harits Naufal Arrazie dengan judul “Testimoni Korban: Operasi *Trawl* dan Perlawanan Nelayan”. Tulisan ini membahas perlawanan nelayan tradisional terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi *trawl* di wilayah tangkap mereka. Arrazie melihat persoalan sebenarnya terletak pada dampak dari penggunaan *trawl* itu sendiri, yang berakibat pada rusaknya ekosistem laut, terganggunya kehidupan sosial, menurunnya pemasukan ekonomi kehidupan nelayan tradisional.<sup>13</sup>

Dalam artikel kedua, “*The Journey for Pride: Kisah Orang-Orang Hitu di Pesisir Utara Pulau Ambon Merebut Kembali Supremasi Identitasnya*”, Fahmi Sirma Pelu membahas awal pembentukan identitas masyarakat pesisir Hitu hingga terjadinya konflik identitas. Artikel ini menggali proses awal pembentukan masyarakat Hitu sampai dengan era kolonial, dampak pemindahan pelabuhan terhadap identifikasi orang-orang Hitu atas dirinya sendiri, dan konflik identitas yang melibatkan mereka dengan kelompok lain. Otoritas Hitu kehilangan pengaruhnya secara politik dan ekonomi semenjak dipindahkannya pelabuhan ke pantai Honipopu.<sup>14</sup>

Artikel ketiga ditulis oleh Noor Rasya Swarnasta Anindyanari dengan judul “Nelayan dan Masyarakat Pesisir dalam Cerita Pendek ‘Laki-laki yang Tubuhnya Habis Dimakan Ikan-ikan Kecil’ Karya Mashdar Zainal: Kajian Sosiologi Sastra”. Swarnasta menggunakan kajian sosiologi sastra untuk mengetahui gambaran kehidupan sosial masyarakat dalam karya sastra. Penelitian ini membahas tentang analisis struktural cerpen, nelayan pada cerpen dalam konteks masyarakat nelayan, dan nelayan pada cerpen sebagai bagian dari masyarakat pesisir.

Pengerjaan rubrik Potret pada edisi ini berbeda dengan jurnal edisi sebelumnya. Untuk edisi ini, Tita Meydhalifah menulis esai tentang upaya yang dilakukan oleh nelayan di Pantai Baru, Bantul, untuk beradaptasi di masa paceklik. Meydhalifah menjelaskan

12. Conner Bailey, “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia”, *Indonesia*, No. 46, 1988, hlm.. 25—38.

13. Harits Naufal Arrazie, “Testimoni Korban: Operasi *Trawl* dan Perlawanan Nelayan,” *BALAIRUNG: Masyarakat Pesisir*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.

14. Fahmi Sirma Pelu, “The Journey for Pride: Kisah Orang-Orang Hitu di Pesisir Utara Pulau Ambon Merebut Kembali Supremasi Identitasnya,” *BALAIRUNG: Masyarakat Pesisir*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.

tentang salah satu cara adaptasi yang dilakukan nelayan, yaitu intensifikasi. Sementara itu, foto yang diambil oleh Widya Rafifa Salsabila dan Arjun Pratiq Zamzamy Subarkah ingin menampilkan proses dan keadaan nelayan saat menangkap ikan.

Beby Putri Adriansa Pane berbincang dengan Pujo Semedi Hargo Yuwono, ahli di bidang nelayan dan dosen jurusan Antropologi Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, untuk rubrik Insan Wawasan. Melalui perbincangan itu, Pane mencoba untuk menggali kritik atas ide pengavelingan laut. Sebelum adanya regulasi tentang pengavelingan laut, nelayan sudah memiliki batas wilayah masing-masing. Pasca reformasi, pengavelingan dilakukan dengan alasan adanya pajak yang masuk ke daerah, yang mana merupakan alasan politik ekonomi.

Rubrik Rehal yang ditulis oleh Anggriani Mahdianingsih, mengulas buku *Fishers and Plunderers: Theft, Slavery and Violence at Sea*. Penulis buku, Alastair Cooper, Hance Smith, dan Bruno Ciceri memanfaatkan kekayaan pengalaman mereka untuk menulis buku sebagai rangkuman atas tragedi yang ditimbulkan industri perikanan dan dampaknya terhadap nelayan. Mahdianingsih menjelaskan, alih-alih menuju kesejahteraan, mafia dan pembajak justru membuat profesi nelayan semakin sulit dan jauh dari

ketentraman, apalagi kesejahteraan. Artikel Pusparagam Keilmuan dalam edisi ini sejatinya berjumlah empat. Akan tetapi, setelah proses *review* tiga, kami merasa bahwa satu artikel dinyatakan tidak layak terbit. Upaya menghubungi penulis sudah dilakukan, namun penulis tidak menanggapi. Dengan berat hati kami mengurangi jumlah artikel Pusparagam Keilmuan dan tetap menerbitkan edisi ini. Perlu diketahui pula, edisi ini mengalami keterlambatan terbit. Awalnya edisi ini ditargetkan dapat terbit pada awal tahun 2020. Namun, karena satu dan lain hal, kami baru dapat menerbitkannya pada bulan November 2020.

Kami menyadari, BALAIRUNG edisi ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi konten maupun manajemen penerbitan. Sebagai jurnal multidisipliner, edisi ini belum dapat memenuhi hal tersebut. Semua tulisan yang masuk saat *Call for Paper* berasal dari bidang studi sosio-humaniora. Pada akhirnya, jurnal edisi ini tetap didominasi oleh bidang studi sosio-humaniora, seperti edisi sebelumnya. Meskipun begitu, kami harap konten dalam edisi ini dapat memberikan sumbangsih dalam diskusi tentang nelayan dan masyarakat pesisir. Di masa mendatang, kami harap pembahasan tentang masyarakat pesisir akan terus ada dan dapat dibahas dari berbagai sudut pandang keilmuan.

## Daftar Pustaka

- Acheson M., James. "Anthropology of Fishing". *Annual Review of Anthropology*. Vol. 10 (1981), hlm. 225—316.
- Bailey, Conner. "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia". *Indonesia*. No. 46 (Oct. 1988), hlm. 25—38.
- Francois, Alexandre. "The dynamics of linguistic diversity, Egalitarian multilingualism and power imbalance among northern Vanuatu languages," *International Journal of the Sociology of Language*. 214, hlm. 85—110.
- Knapp, Gerrit J, *Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1775*, (Leiden: KITLV Press, 1996).
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Palsson, Gisli. "The Art of Fishing." *Maritime Anthropological Studies*. Vol. 2 (1989), hlm. 1—20.
- Semedi, Pujo. *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung: Studi Nelayan Miskin di Desa Kridowono*. Jakarta: Konphalindo. 1998.
- Sulistiwati, Endang, Singgih Tri Sulistiyono, Yety Kurnianingsih. "Coastal Civilization and maritime diplomacy in premodern Southeast Asia". *The International Journal of Maritime History*. Vol. 30 (2018), hlm.. 649—662.
- Tesart, A., Arcand, B., Ingold, T., Legros, D., Linken, A., Morton, J., . . . & Walter, M. S. "Some major problems in the social anthropology of hunter-gatherers [and Comments and Reply]." *Current Anthropology*. Vol. 29 (2018), hlm. 1—31.
- Urquhart, Julie dan Tim Acott. "A Sense of Place in Cultural Ecosystem Service: A Case of Cornish Fishing Communities." *Society and Natural Resources*. Vol. 27 (2013), hlm. 3—19.